



**BAPENDA
PASTI BISA**

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024

**BADAN
PENDAPATAN
DAERAH**
Kabupaten Jombang

<https://bapenda.jombangkab.go.id> 

bapendajombang 

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kabupaten Jombang. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Jombang maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Rencana Kerja Perubahan yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan ini, Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini. Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan memerlukan adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan ini dirancang dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan yang ada. Dengan demikian, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih responsif dan efisien.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat, serta memotivasi semua pihak untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jombang. Kami berharap, melalui kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat terus maju dan mencapai kemajuan yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.



Jombang, 31 Juli 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

HARTONO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691002 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 1

 1.3. Maksud Dan Tujuan 3

 1.4. Sistematika Rencana Kerja..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 5

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD 5

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 14

 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 16

 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 28

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 28

 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran 29

 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan 30

BAB IV 41

PENUTUP 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Sebagai penjabaran Renstra OPD, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menindaklanjuti evaluasi kinerja anggaran, maka dilakukan penyesuaian anggaran dan perlu disusun Rencana Kerja Perubahan OPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan evaluasi pada pertengahan tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD tetap berpedoman pada Review Renstra OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2024, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan pendapatan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Sesuai dengan kondisi dan situasi sebagai bagian dari Kelembagaan Pemerintahan di Daerah maka keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang secara Organisatoris di Pemerintahan Kabupaten Jombang, dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, yang menjadi landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 46 Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan P-RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024; dan
21. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 100.3.4.2/325/415.01/2024 tanggal 8 Mei 2024 hal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah yang lebih berkualitas;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik;
4. Tersedianya informasi tentang Pendapatan daerah yang cepat dan akurat;
5. Tersedianya piranti pendukung Pendapatan daerah yang memadai.

1.4. Sistematika Rencana Kerja

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Rencana Kerja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan diperlukan guna memperbaiki hal-hal yang menyebabkan pencapaian target kinerja kurang optimal. Evaluasi juga berguna sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya jika dirasakan manfaatnya untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Evaluasi hasil renja OPD tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dalam dokumen Renja tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja tahun 2024, sedangkan jumlah Anggaran (Rupiah) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Jombang tahun 2024.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya dokumen SAKIP OPD;
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan;
- c. Meningkatnya potensi PAD;
- d. Meningkatnya keakuratan data Objek Pajak;
- e. Terlaksananya penetapan serta penerbitan data.

Beberapa hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai sesuai target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung oleh prasarana dan sarana kerja;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- c. Meningkatkan akurasi data pendapatan daerah;
- d. Tertib administrasi pelaporan pendapatan daerah.

Hasil Evaluasi pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang triwulan II Tahun 2024 adalah digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

APBD 2024				Realisasi APBD s/d Triwulan II		Keterangan
Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	10.292.229.307	1.115.046.726	10,83%	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	1.104.856.700	123.692.000	11,20%	
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	7.057.900.607	421.016.442	5,97%	
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	1.979.157.000	409.722.892	20,70%	
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	150.315.000	160.615.392	106,85%	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	277.344.750	-	0,00%	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6.627.183.957	123.692.000	1,87%	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	567.361.950	123.692.000	21,80%	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	430.716.650	13.512.050	3,14%	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	319.129.000	249.107.500	78,06%	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	1.660.028.000	135.270.392	8,15%	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	260.150.000	23.126.500	8,89%	

5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	150.315.000	2.218.500	1,48%	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	17.674.858.537	4.754.908.168	26,90%	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	27.248.220	5.406.500	19,84%	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	15.594.700	4.350.000	27,89%	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	11.653.520	1.056.500	9,07%	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	15.322.683.585	4.433.805.941	28,94%	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.877.339.685	4.396.070.529	29,55%	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	442.848.000	37.735.412	8,52%	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.495.900	-	0,00%	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	292.583.630	111.800.000	38,21%	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38.400.000	-	0,00%	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	139.000.000	-	0,00%	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.183.630	111.800.000	97,06%	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	900.521.020	142.313.513	15,80%	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.855.600	3.966.120	33,45%	

5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	478.163.320	43.041.050	9,00%	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.431.100	3.354	0,08%	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	253.749.500	36.949.100	14,56%	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40.021.500	27.299.000	68,21%	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.388.000	1.260.000	12,13%	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.912.000	29.462.843	28,91%	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	436.895.432	83.588.864	19,13%	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	230.630.000	64.047.414	27,77%	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	206.265.432	19.541.450	9,47%	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	694.926.650	89.793.350	12,92%	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	404.000.000	38.888.100	9,63%	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95.688.850	29.405.250	30,73%	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	195.237.800	21.500.000	11,01%	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100	4	4	8	214,40	100	20,90	20,90
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	152.891.650.000	1	1	2	168,00	152.891.650.000	100.661.323.288	65,84
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	694.000	691.000	691.000	696.867	100,85	694.000	711.365	102,50
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	152.891.650.000	147.812.645.301	147.820.050.000	185.969.721.019	125,81	152.891.650.000	100.661.323.288	65,84
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	413.800.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	413.800.000.000	7.220.305.499	1,74
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4	2	50,00
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00

		Pajak dan Wajib Pajak Daerah								
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	692.000	691.000	691.000	696.867	100,85	692.000	711.365	102,80
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4.000	6.850	171,25
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	12	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	50,00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	90	101.45	90	109.32	n/a	90	101	112,72
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100	100	100	100	100,00	100	42	41,67
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3	3	3	3	100,00	3	-	0,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9	9	12	9	75,00	9	5	55,56

5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100	100	100	100	100,00	100	92	91,57
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	1	1.118	1.118	100,00	70	70	100,00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	-	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	45	45,05
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87	n/a	n/a	n/a	n/a	87	1	1,15
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5	n/a	n/a	n/a	n/a	5	1	20,00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90	n/a	n/a	n/a	n/a	90	82	91,11
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100	100	100	100	100,00	100	53	53,25
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2	2	2	100,00	1	1	100,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7	7	7	100,00	1	1	100,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00

		Tangga yang Disediakan								
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	8	8	8	100,00	1	1	100,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17	3	3	3	100,00	17	9	52,94
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	48	48	48	100,00	48	24	50,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	12	12	12	100,00	8	4	50,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100	100	100	100	100,00	100	50	50,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100	100	100	100	100,00	100	48	48,15
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	36	36	36	100,00	32	15	46,88
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00

		yang Dipelihara/Direhabilitasi								
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	20	20	20	100,00	21	10	47,62

Berdasarkan hasil evaluasi yang tersaji pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian anggaran telah terealisasi pada triwulan II dan kinerja tercapai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan anggaran kas yang ditempatkan di triwulan akhir dan dokumen pertanggungjawaban yang masih dalam proses di bagian keuangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan. Tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, dapat dilaksanakan melalui beberapa aspek/fokus sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;
2. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah Pendapatan yaitu melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Penetapan dan penerbitan data potensi, serta pengendalian dan pelaporan penerimaan PAD secara tertib melalui pelayanan dasar dan pelayanan penunjang sesuai RPJMD;
3. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang difokuskan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan yang difokuskan pada Peraturan Bupati terkait Pendapatan Daerah yang perlu ditindaklanjuti;
5. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD;
6. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, dan Peningkatan PAD dari tahun sebelumnya;
7. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat yang difokuskan pada bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsifitas terhadap partisipasi masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan.

Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2022 S.D 30 Juni 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

No	Uraian	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022		Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023		Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	
		Rp	Rp.	%	Rp	Rp.	%	Rp	Rp.	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	135.421.000.000,00	172.199.090.357,00	127,16	163.627.000.000,00	185.969.721.019,00	113,65	194.080.000.000,00	99.488.571.156,00	51,26
2	Hasil Retribusi Daerah	17.491.649.455,00	20.625.241.069,53	117,91	19.862.764.623,00	24.642.310.018,00	124,06	20.400.750.103,00	6.806.720.655,00	33,37
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.924.141.742,89	4.917.041.528,56	99,86	7.308.019.425,00	5.778.730.454,51	79,07	8.206.626.422,00	1.457.265.776,61	17,76
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	307.713.781.892,08	324.440.063.150,58	105,44	361.840.818.680,00	411.768.856.235,85	113,80	384.229.164.000,00	165.318.149.301,29	43,03
		465.550.573.089,97	522.181.436.105,67	112,16	552.638.602.728,00	628.159.617.727,36	113,67	606.916.540.525,00	273.070.706.888,90	44,99

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya. Berdasarkan hasil analisis pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:

1. Keakuratan Data base Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Tersebarnya Lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten yang sulit diidentifikasi;
3. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
4. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
5. Belum terbitnya Regulasi di daerah yang terkait dengan Undang – Undang Hubungan Pusat dan Keuangan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.

Dengan demikian kesimpulan dari Isu strategis di atas adalah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya Sistem Pendataan yang semakin mantap, akurat, jelas dan mudah dipahami berlandaskan pada aturan pengelolaan Pendapatan yang berlaku;
2. Terciptanya pengelolaan Pendapatan daerah yang semakin terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja;
3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan;
4. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Terlaksananya Jasa Pendataan Pajak Daerah oleh Pihak Ketiga yang berkompeten;
6. Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan Pajak dan retribusi daerah terhadap Wajib Pajak dan Retribusi;
7. Terciptanya Reward dan Punishment yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah;
8. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan hasil dari proses perencanaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk instansi vertikal, eksekutif, dan legislatif. Hal ini bertujuan agar hasil perencanaan anggaran dan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan yang nyata dan aspirasi masyarakat.

Proses perencanaan anggaran yang efektif memerlukan partisipasi dan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait. Masyarakat sebagai stakeholder utama harus diberi kesempatan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dianggap penting. Partisipasi ini bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti musyawarah desa, forum perencanaan, atau konsultasi publik. Begitu juga dengan instansi vertikal, eksekutif, dan legislatif yang harus berperan aktif dalam memberikan masukan dan mendukung implementasi rencana yang telah disusun.

Penelaahan usulan perubahan dilakukan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan program serta kegiatan yang telah diusulkan oleh masyarakat. Proses ini melibatkan pengkajian kesesuaian usulan dengan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan rencana strategis daerah, penilaian kelayakan dari segi teknis, anggaran, dan dampak sosial-ekonomi dari usulan yang diterima serta melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk memperjelas dan menyesuaikan usulan dengan kondisi yang ada.

Hasil penelaahan dari usulan perubahan ini akan digunakan untuk menyusun rencana anggaran yang lebih terperinci. Proses ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Anggaran yang disusun harus mencerminkan prioritas yang telah disepakati dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Setelah rencana anggaran disetujui, tahap berikutnya adalah implementasi program dan kegiatan. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas dari setiap kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Nama program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator/Keluaran	Target	Lokasi	Usulan Anggaran (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2024	Nama program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator/Keluaran	Target	Lokasi	Usulan Anggaran (Rp.)	Prakiraan Maju Tahun 2024
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	BAPENDA	6.347.127.050	6.347.127.050	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	BAPENDA	6.347.127.050	6.347.127.050
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	151.391.650.000	BAPENDA	1.023.012.300	1.023.012.300	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	151.391.650.000	BAPENDA	1.023.012.300	1.023.012.300
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	694.000	BAPENDA	857.219.750	857.219.750		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	694.000	BAPENDA	857.219.750	857.219.750
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	151.391.650.000	BAPENDA	4.146.829.000	4.146.829.000		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	151.391.650.000	BAPENDA	4.146.829.000	4.146.829.000
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	413.800.000.000	BAPENDA	320.066.000	320.066.000		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	413.800.000.000	BAPENDA	320.066.000	320.066.000
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	BAPENDA	299.999.800	299.999.800	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	BAPENDA	299.999.800	299.999.800
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3500 layanan	BAPENDA	209.624.500	209.624.500	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3500 layanan	BAPENDA	209.624.500	209.624.500
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA	513.388.000	513.388.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA	513.388.000	513.388.000

5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA	446.369.000	446.369.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	BAPENDA	446.369.000	446.369.000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	692000 dokumen	BAPENDA	410.850.750	410.850.750	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	692000 dokumen	BAPENDA	410.850.750	410.850.750
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA	3.672.429.000	3.672.429.000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA	3.672.429.000	3.672.429.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA	474.400.000	474.400.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	BAPENDA	474.400.000	474.400.000
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	BAPENDA	320.066.000	320.066.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan	BAPENDA	320.066.000	320.066.000
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur sipil negara	100%	BAPENDA	25.746.572.588	25.746.572.588	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur sipil negara	100%	BAPENDA	25.746.572.588	25.746.572.588
5.02.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	100%	BAPENDA	32.745.000	32.745.000	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	100%	BAPENDA	32.745.000	32.745.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	BAPENDA	17.555.000	17.555.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	BAPENDA	17.555.000	17.555.000

5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian	9 laporan	BAPENDA	15.190.000	15.190.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian	9 laporan	BAPENDA	15.190.000	15.190.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	BAPENDA	13.912.709.368	13.912.709.368	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	BAPENDA	13.912.709.368	13.912.709.368
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	BAPENDA	13.459.009.468	13.459.009.468	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	BAPENDA	13.459.009.468	13.459.009.468
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	BAPENDA	451.200.000	451.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	BAPENDA	451.200.000	451.200.000
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	1 laporan	BAPENDA	2.499.900	2.499.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Perangkat Daerah	1 laporan	BAPENDA	2.499.900	2.499.900
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	100%	BAPENDA	207.660.000	207.660.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	100%	BAPENDA	207.660.000	207.660.000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 paket	BAPENDA	26.100.000	26.100.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 paket	BAPENDA	26.100.000	26.100.000

5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	BAPENDA	67.140.000	67.140.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	BAPENDA	67.140.000	67.140.000
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	BAPENDA	114.420.000	114.420.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	BAPENDA	114.420.000	114.420.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD	100%	BAPENDA	1.184.455.820	1.184.455.820	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD	100%	BAPENDA	1.184.455.820	1.184.455.820
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	11.855.800	11.855.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	11.855.800	11.855.800
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	625.336.820	625.336.820	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	625.336.820	625.336.820
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	4.433.100	4.433.100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	4.433.100	4.433.100
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	404.631.500	404.631.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	BAPENDA	404.631.500	404.631.500
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	BAPENDA	40.049.600	40.049.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	BAPENDA	40.049.600	40.049.600
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 paket	BAPENDA	10.388.000	10.388.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 paket	BAPENDA	10.388.000	10.388.000

5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	BAPENDA	87.761.000	87.761.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	BAPENDA	87.761.000	87.761.000
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	BAPENDA	553.694.500	553.694.500	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	BAPENDA	553.694.500	553.694.500
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA	230.630.000	230.630.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA	230.630.000	230.630.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA	323.064.500	323.064.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	BAPENDA	323.064.500	323.064.500
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	BAPENDA	9.855.307.900	9.855.307.900	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	BAPENDA	9.855.307.900	9.855.307.900
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 kendaraan	BAPENDA	143.263.500	143.263.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 kendaraan	BAPENDA	143.263.500	143.263.500
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	BAPENDA	9.595.210.400	9.595.210.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	BAPENDA	9.595.210.400	9.595.210.400

5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	21 sarana	BAPENDA	116.834.000	116.834.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	21 sarana	BAPENDA	116.834.000	116.834.000
					32.093.699.638	32.093.699.638					32.093.699.638	32.093.699.638

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum SKPD Kabupaten, maka ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 34.179.429.515,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kabupaten Jombang

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Bapenda	100%	17.245.459.307	APBD 2024
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Bapenda	Rp194.080.000.000	1.444.856.700	APBD 2024
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Bapenda	694.000 objek pajak	10.991.614.107	APBD 2024
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Bapenda	Rp194.080.000.000	4.728.343.500	APBD 2024
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Bapenda	Rp413.800.000.000	80.645.000	APBD 2024
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	4 dokumen	537.394.750	APBD 2024
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	10.210.897.457	APBD 2024
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Bapenda	12 laporan	807.361.950	APBD 2024
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	692.000 dokumen	780.716.650	APBD 2024
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	3.500 layanan	413.649.000	APBD 2024
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	4.314.694.500	APBD 2024
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	100.100.000	APBD 2024

5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	80.645.000	APBD 2024
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	Bapenda	100%	16.933.970.208	APBD 2024
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Bapenda	100%	128.401.119	APBD 2024
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Bapenda	3 dokumen	116.747.599	APBD 2024
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Bapenda	9 laporan	11.653.520	APBD 2024
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Bapenda	100%	12.966.803.302	APBD 2024
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	70 orang/bulan	12.554.028.902	APBD 2024
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	12 dokumen	410.278.500	APBD 2024
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1 laporan	2.495.900	APBD 2024
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Bapenda	100%	291.579.400	APBD 2024
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	87 paket	38.400.000	APBD 2024
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Bapenda	5 orang	37.800.000	APBD 2024
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	90 orang	215.379.400	APBD 2024
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Bapenda	100%	1.685.197.570	APBD 2024
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	15.019.200	APBD 2024

5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	1.204.263.270	APBD 2024
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	1 paket	4.431.100	APBD 2024
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	256.449.500	APBD 2024
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	17 paket	42.021.500	APBD 2024
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	48 dokumen	10.388.000	APBD 2024
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	8 laporan	152.625.000	APBD 2024
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	466.686.432	APBD 2024
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	250.630.000	APBD 2024
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	216.056.432	APBD 2024
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	1.395.302.385	APBD 2024
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	32 unit	404.000.000	APBD 2024
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	703.806.268	APBD 2024
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	21 unit	287.496.117	APBD 2024

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi Pendapatan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai potensi daerah dalam mendukung rencana pembangunan daerah, serta kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah perlu melaksanakan perbaikan terkait pengelolaan pendapatan daerah di antaranya melalui pengelolaan administrasi yang baik dan kebijakan yang tepat di bidang pengelolaan pendapatan daerah, dengan melalui beberapa kebijakan yang diarahkan pada :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan;
2. Pemenuhan SDM yang handal melalui Pelaksanaan BinteK Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi aparatur;
3. Melakukan evaluasi, pembinaan serta penelitian potensi pendapatan daerah secara terus menerus;
4. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan SKPD penghasil dan DPRD;
5. Perwujudan pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien;
6. Peningkatan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai arah kebijakan tersebut melalui :

1. Pengembangan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur;
2. Penerapan Sistem pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan daerah;
4. Peningkatan pemahaman akan kesadaran wajib Pajak dalam membayar pajak daerah;
5. Peningkatan Kemampuan Pemungut dalam peningkatan potensi Pajak Daerah.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah bagian penting dari perencanaan strategis yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengatur aktivitas Bapenda dalam mencapai hasil yang optimal dalam periode tertentu. Tujuan dalam Rencana Kerja Bapenda adalah pernyataan strategis tentang hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan ini memberikan arahan umum dan fokus utama dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai visi dan misi Bapenda. Tujuan umumnya mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan, transparansi dalam administrasi, serta peningkatan pelayanan publik terkait pajak dan retribusi. Sasaran adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang harus dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan. Sasaran ini mencakup aktivitas dan output yang diharapkan dalam periode perencanaan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokras	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$X = \frac{(\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD tahun } n - 1)}{(\text{Realisasi PAD tahun } n - 1)} \times 100\%$
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi SAKIP tahun n
	Terlaksananya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	$X = \frac{\text{Realisasi PAD tahun } n}{\text{Target PAD tahun } n} \times 100\%$

	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase Rata – rata capaian Kinerja aparatur sipil negara	$X = \frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pegawai}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$
--	---	--	--

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mengelolah anggaran yang tertuang dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 34.179.429.515,00 melalui dua program, tujuh kegiatan dan dua puluh delapan sub kegiatan seperti yang terdapat pada table 3.2. Terkait dukungan terhadap penganggaran responsive gender, dipilih sub kegiatan Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator/Keluaran
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Dari uraian tersebut diatas dapat di lihat pada rincian tabel matriks Rencana Kerja Perubahan tahun 2024, berikut ini :

Tabel 3.3
Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Rencana kerja dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2024					Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Bapenda	100%	17.245.459.307	APBD 2024		100%	17.245.459.307
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Bapenda	Rp194.080.000.000	1.444.856.700	APBD 2024		Rp194.080.000.000	1.444.856.700
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Bapenda	694.000 objek pajak	10.991.614.107	APBD 2024		694.000 objek pajak	10.991.614.107
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Bapenda	Rp194.080.000.000	4.728.343.500	APBD 2024		Rp194.080.000.000	4.728.343.500
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Bapenda	Rp413.800.000.000	80.645.000	APBD 2024		Rp413.800.000.000	80.645.000
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	4 dokumen	537.394.750	APBD 2024		4 dokumen	537.394.750
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	10.210.897.457	APBD 2024		12 laporan	10.210.897.457
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Bapenda	12 laporan	807.361.950	APBD 2024		12 laporan	807.361.950
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	692.000 dokumen	780.716.650	APBD 2024		692.000 dokumen	780.716.650
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	3.500 layanan	413.649.000	APBD 2024		3.500 layanan	413.649.000
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	4.314.694.500	APBD 2024		12 dokumen	4.314.694.500
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	100.100.000	APBD 2024		12 dokumen	100.100.000

5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	80.645.000	APBD 2024		12 laporan	80.645.000
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	Bapenda	100%	16.933.970.208	APBD 2024		100%	16.933.970.208
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Bapenda	100%	128.401.119	APBD 2024		100%	128.401.119
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Bapenda	3 dokumen	116.747.599	APBD 2024		3 dokumen	116.747.599
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Bapenda	9 laporan	11.653.520	APBD 2024		9 laporan	11.653.520
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Bapenda	100%	12.966.803.302	APBD 2024		100%	12.966.803.302
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	70 orang/bulan	12.554.028.902	APBD 2024		70 orang/bulan	12.554.028.902
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	12 dokumen	410.278.500	APBD 2024		12 dokumen	410.278.500
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1 laporan	2.495.900	APBD 2024		1 laporan	2.495.900
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Bapenda	100%	291.579.400	APBD 2024		100%	291.579.400
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	87 paket	38.400.000	APBD 2024		87 paket	38.400.000
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Bapenda	5 orang	37.800.000	APBD 2024		5 orang	37.800.000
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	90 orang	215.379.400	APBD 2024		90 orang	215.379.400
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Bapenda	100%	1.685.197.570	APBD 2024		100%	1.685.197.570
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	15.019.200	APBD 2024		1 paket	15.019.200

5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	1.204.263.270	APBD 2024		1 paket	1.204.263.270
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	1 paket	4.431.100	APBD 2024		1 paket	4.431.100
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	256.449.500	APBD 2024		1 paket	256.449.500
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	17 paket	42.021.500	APBD 2024		17 paket	42.021.500
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	48 dokumen	10.388.000	APBD 2024		48 dokumen	10.388.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	8 laporan	152.625.000	APBD 2024		8 laporan	152.625.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	466.686.432	APBD 2024		100%	466.686.432
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	250.630.000	APBD 2024		12 laporan	250.630.000
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	216.056.432	APBD 2024		12 laporan	216.056.432
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	1.395.302.385	APBD 2024		100%	1.395.302.385
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	32 unit	404.000.000	APBD 2024		32 unit	404.000.000
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	703.806.268	APBD 2024		1 unit	703.806.268
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	21 unit	287.496.117	APBD 2024		21 unit	287.496.117

Tabel 3.4
Perubahan Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Pagu Indikatif Pada Perubahan Renja Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2024				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2024		Bertambah/ (Berkurang)	
					Target Renja 2024		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10-6)	13=(11-7)
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
05.02	URUSAN KEUANGAN											
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	8,04%	100%	10.292.229.307	21%	1.115.046.726	100%	17.245.459.307	0%	6.953.230.000
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	152.891.650.000	21,00%	152.891.650.000	1.104.856.700	100.661.323.288	123.692.000	194.080.000.000	1.444.856.700	41.188.350.000	340.000.000
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	649.000 OP	696.867 OP	649.000 OP	7.057.900.607	711.365	421.016.442	694.000 OP	10.991.614.107	0 OP	3.933.713.500
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	152.891.650.000	185.969.721.019	152.891.650.000	1.979.157.000	100.661.323.288	409.722.892	194.080.000.000	4.728.343.500	41.188.350.000	2.749.186.500
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	413.800.000.000	-	413.800.000.000	150.315.000	7.220.305.499	160.615.392	413.800.000.000	80.645.000	-	- 69.670.000
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	-	4 dokumen	277.344.750	2 dokumen	-	4 dokumen	537.394.750	0 dokumen	260.050.000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6.627.183.957	6 laporan	123.692.000	12 laporan	10.210.897.457	0 laporan	3.583.713.500

		Pajak dan Wajib Pajak Daerah										
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	12 laporan	12 laporan	12 laporan	567.361.950	6 laporan	123.692.000	12 laporan	807.361.950	0 laporan	240.000.000
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	692.000 dokumen	696.867 dokumen	692.000 dokumen	430.716.650	711.365 dokumen	13.512.050	692.000 dokumen	780.716.650	0 dokumen	350.000.000
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.500 layanan	-	3.500 layanan	319.129.000	6.850 layanan	249.107.500	3.500 layanan	413.649.000	0 layanan	94.520.000
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.660.028.000	6 dokumen	135.270.392	12 dokumen	4.314.694.500	0 dokumen	2.654.666.500
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	260.150.000	6 dokumen	23.126.500	12 dokumen	100.100.000	0 dokumen	- 160.050.000
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	-	12 laporan	150.315.000	6 laporan	2.218.500	12 laporan	80.645.000	0 laporan	- 69.670.000
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	90%	109,32%	90%	17.674.858.537	101,45%	4.754.908.168	100%	16.933.970.208	0%	- 740.888.329
5.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	100%	27.248.220	41,67%	5.406.500	100%	128.401.119	0%	101.152.899
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3 dok	3 dok	3 dok	15.594.700	- dokumen	4.350.000	3 dokumen	116.747.599	0 dokumen	101.152.899

5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9 dok	9 dok	9 dok	11.653.520	5 laporan	1.056.500	9 laporan	11.653.520	0 laporan	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	100%	100%	15.322.683.585	91,57%	4.433.805.941	100%	12.966.803.302	0%	- 2.355.880.283
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang / bulan	1118 orang	70 orang / bulan	14.877.339.685	70 orang/ bulan	4.396.070.529	70 orang/bulan	12.554.028.902	0 orang/ bulan	- 2.323.310.783
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	442.848.000	6 dokumen	37.735.412	12 dokumen	410.278.500	0 dokumen	- 32.569.500
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	1 laporan	2.495.900	- laporan	-	1 laporan	2.495.900	0 laporan	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	100%	100%	100%	292.583.630	45,05%	111.800.000	100%	291.579.400	0%	- 1.004.230
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87 paket	-	87 paket	38.400.000	- paket	-	87 paket	38.400.000	0 paket	-
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 orang	-	5 orang	139.000.000	- orang	-	5 orang	37.800.000	0 orang	- 101.200.000
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	-	90 orang	115.183.630	82 orang	111.800.000	90 orang	215.379.400	0 orang	100.195.770

	Perundang-Undangan											
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100%	100%	100%	900.521.020	53,25%	142.313.513	100%	1.685.197.570	0%	784.676.550
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2 paket	1 paket	11.855.600	1 paket	3.966.120	1 paket	15.019.200	0 paket	3.163.600
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	7 paket	1 paket	478.163.320	1 paket	43.041.050	1 paket	1.204.263.270	0 paket	726.099.950
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	4.431.100	1 paket	3.354	1 paket	4.431.100	0 paket	-
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	8 paket	1 paket	253.749.500	1 paket	36.949.100	1 paket	256.449.500	0 paket	2.700.000
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	3 paket	17 paket	40.021.500	9 paket	27.299.000	17 paket	42.021.500	0 paket	2.000.000
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	10.388.000	24 dokumen	1.260.000	48 dokumen	10.388.000	0 dokumen	-
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	12 laporan	8 laporan	101.912.000	4 laporan	29.462.843	8 laporan	152.625.000	0 laporan	50.713.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	100%	100%	436.895.432	50%	83.588.864	100%	466.686.432	0%	29.791.000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	230.630.000	6 laporan	64.047.414	12 laporan	250.630.000	0 laporan	20.000.000

5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	206.265.432	6 laporan	19.541.450	12 laporan	216.056.432	0 laporan	9.791.000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	100%	100%	694.926.650	48,15%	89.793.350	100%	1.395.302.385	0%	700.375.735
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	36 unit	32 unit	404.000.000	15 unit	38.888.100	32 unit	404.000.000	0 unit	-
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	95.688.850	1 unit	29.405.250	1 unit	703.806.268	0 unit	608.117.418
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	20 unit	21 unit	195.237.800	10 unit	21.500.000	21 unit	287.496.117	0 unit	92.258.317

BAB IV PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di Bidang Pendapatan Daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2024 sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, akan tetapi juga sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Harapan Kami, semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan Jombang Sejahtera untuk Semua.

